

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Faisal Abdullah, 2011, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta, Kencana.
- G.J Wolhoff, 1960, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Timun Mas.
- Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Marbun, 1998, *Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- , 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Miftah Thoha, 2008, *Menejemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Muhadam Labolo, Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nuraida Mokhsen *et al.*, 2018, *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*, Jakarta, Komisi Aparatur Sipil Negara.
- Rusli Karim, 1991, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta, Tiara Wacana.

Siti Zakiyah *et al.*, 2018, *Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kebijakan dan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*, Samarinda, PKP2 III LAN.

Sri Hartini *et al.*, 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,

Sri Hartini, Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

W,J,S Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Warsito Utomo, 2006, *Administrasi Publik Baru Indonesia: Perubahan Paradigma dari Admministrasi Negara ke Administrasi Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

B. Jurnal

Bagus Sarnawa, “Pengaturan dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24 No.1 (2017).

Galuh Kartiko, “Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2 No. 1 (2009).

Nuswantoro Setyadi, “Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2019, Bisa Netralkah?”, *Jurnal Analis Kebijakan*, Vol. 3 No. 1 (2019).

Mat Zudi, Arief Hidayat, Untung Sri Hardjanto, “Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah”, *Diponegoro Law Review*, Vol. 1 No. 4 (2012).

Rani Nurroufah Pratiwi, “Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Legislatif oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2014).

Rina Martini, “Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013”, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 14 No. 1 (2015).

Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat, “Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah)”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 3 (2014).

Sri Yuliani, “Netralitas Birokrasi: Alat Politik atau Profesionalisme?”, *Jurnal DINAMIKA Fisip UNS*, Vol. 3 No. 2 (2003).

Stevenril Mokoagow, “Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah”, *Lex Administratum*, Vol. 4 No. 4 (2016).

Tatang Sudrajat, “Netralitas PNS dan Masa Depan Demokrasi dalam Pilkada Serentak 2015”, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 12 No. 3 (2015).

Tedi Sudrajat, Agus Mulya Karsona, “Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 1 (2016).

C. Tesis

La Ode Amin, 2013, “Netralitas Birokrat Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kota Makasar dalam Pemilukada”, (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang “Pokok-Pokok Kepegawaian”.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang “Aparatur Sipil Negara”.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang “Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil”.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang “Disiplin Pegawai Negeri Sipil”.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2018 tentang “Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Yogyakarta”.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang “Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara”.

E. Internet

Jazaul Akbar, *Netral dalam Politik, Perlukah Hal Tersebut?*, <https://www.kompasiana.com/morisjak/5c8abb990b531c7c7b28aa19/netral-dalam-politik-perlukah-hal-tersebut>, diunduh pada hari Minggu, 20 Oktober 2019, jam 20.17 WIB.

Tatang Guritno, *Apa Saja yang Tak Boleh ASN Lakukan biar Tak Langgar Asas Netralitas?*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/03/07130081/apa-saja-yang-tak-boleh-asn-lakukan-biar-tak-langgar-asas-netralitas->, diunduh pada hari Rabu, 19 Februari 2020, jam 10.37 WIB.

Yandri Daniel Damaledo, *991 ASN Pelanggar Netralitas Terancam Sanksi Disiplin dan Kode Etik*, 23 Juli 2019, <https://tirto.id/991-asn-pelanggar-netralitas-terancam-sanksi-disiplin-dan-kode-etik-eeTX>, diunduh pada hari Selasa, 22 Oktober 2019, jam 21.39 WIB.